

## TAJUK RENCANA

### Mengedukasi Warga Bersedia Divaksin

**PENGUMUMAN** Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan bila vaksin Covid-19 produksi Sinovac China, suci dan halal digunakan (KR, 9/1) menghadirkan kelegaan. Paling tidak, konferensi pers pascasidang secara maraton Komisi Fatwa MUI sudah mengantongi 50% kepercayaan masyarakat untuk bersedia divaksin pada waktunya. Karena memang masih ada 50% lagi yang masih ditunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pelaksanaan vaksinasi memang sudah ditetapkan akan dimulai 13 Januari mendatang. Dan ada dua syarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk mulai melaksanakan vaksinasi : sertifikasi halal MUI dan keamanan vaksin yang menjadi kewenangan BPOM. Pernyataan BPOM inilah yang masih ditunggu. Kehalalan dan kesucian menjadi persyaratan mutlak karena ini sangat berkaitan dengan keyakinan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam

Itulah sebabnya Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh dalam konferensi pers tegas menyatakan fatwa ini belum final atau belum merupakan fatwa utuh. Karena masih menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (*safety*), kualitas (*quality*), dan kemanjuran (*efficacy*). Bila BPOM sudah mengeluarkan izin, maka vaksin produksi Sinovac ini bisa digunakan.

Harus diakui, ada pertanyaan besar mengingat pengumuman dimulainya vaksinasi Covid-19 sudah dilakukan, tapi izin penggunaan darurat atau *emergency use authorization* (EUA) belum ke luar. Meski Kepala BPOM Peny Lukito menegaskan bila hal ini tidak berarti mengikat lembaganya untuk tergesa-gesa menerbitkan EUA tersebut. BPOM baru menerbitkan sertifikat *lot release* pada 1,2 juta vaksin Sinovac yang datang 6 Desember silam. Sertifikat *lot release* merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam memastikan

kualitas vaksin sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Prasangka baik kita adalah pengumuman jadwal vaksinasi yang mendahului ke luarnya izin EUA itu sebagai bagian dari kesiapan pemerintah. Mengingat kita memang sedang berpacu dengan pengembangan wabah Covid-19 yang terus melaju. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai hari ini, 11 - 25 Januari adalah upaya menahkodan laju pandemi, ketika angka Covid-19 terus melesat. Sekalipun banyak yang menilai keputusan ini terlambat, namun orang bijak mengatakan *lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali*.

Kita harus berpacu melawan Covid-19. Angka kasus nasional per 9 Januari mencapai 818.368 pasien positif, 673.511 pasien sehat dan pasien meninggal 23.947 (KR, 10/1). Tragisnya di tengah kondisi seperti itu, berseliweran hoax di medsos mengenai korban-korban berjatuh pascavaksinasi. Padahal jelas, vaksinasi belum dilaksanakan di Indonesia.

Inilah tantangan utama untuk mengedukasi warga. Sosialisasi program vaksinasi perlu dilakukan dengan edukasi warga sejelas-jelasnya. Dan ini tentu bukan pekerjaan ringan apalagi semudah mengembalikan tangan. Ini tugas bersama, bukan hanya tenaga kesehatan, pemimpin dan tokoh masyarakat semata. Bahkan tokoh agama juga perlu dilibatkan dalam mengedukasi warga.

Harus pula dipahami, vaksinasi bukan berarti menghilangkan virus ini seketika. Karenanya, protokol kesehatan 5M : mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi migrasi tetap perlu dilakukan. Dan kita tidak bisa egois, individualis dalam tanggung jawab mengendalikan virus. Semua memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama : menjaga agar tidak menularkan. □

## SDGs untuk Kesejahteraan, Catatan Pandemi

**TAHUN 2020** sangat menantang untuk dunia. Pandemi membuat kehidupan terhenti oleh Covid-19, termasuk Indonesia dan DIY pada khususnya. Sebelum pandemi, DIY mencatat prestasi bagus namun juga anomali. Catatan bagus secara umum diwakili Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menduduki peringkat 2 nasional, di bawah DKI Jakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pengukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur dari unsur Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita.

Beberapa indeks lain DIY cukup baik dalam peringkat nasional. Seperti Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Kebudayaan, termasuk peringkat terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Publik dengan nilai AA dan 10 kali meraih opini audit WTP dari BPK.

Namun DIY juga menempati peringkat tertinggi nasional dalam hal ketimpangan, juga angka kemiskinan tertinggi di pulau Jawa. Tentunya ini menjadi anomali yang telah lama diupayakan dan dibahas solusi yang tepat untuk kesejahteraan rakyat DIY.

**Kekayaan**  
Uniknya, pengukuran kemiskinan ternyata tidak identik dengan pengukuran kekayaan. Pengukuran kekayaan sebuah entitas diukur akuntansi pada neraca yang substansinya berisi posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban serta modal/ekuitas. Terukur dengan metode terstandar secara periodik setiap tahunnya. Namun pengukuran kemiskinan menggunakan metode BPS yang mengukur pengeluaran individu untuk makanan dan non-makanan, yang dibandingkan dengan nominal garis kemiskinan. Bobot pengukuran pengeluaran makanan mendapat bobot yang lebih besar, sekitar 70%. Uniknya lagi, seorang yang secara akuntansi memiliki nilai aset tinggi, namun pengeluarannya di bawah nominal garis kemiskinan, akan diukur sebagai

### Doddy Bagus Jatmiko

orang miskin. Sustainable Development Goals (SDGs) alias Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di DIY selama pandemi mengalami tantangan karena pandemi melumpuhkan DIY sebelum perlahan bangkit. Angka kemiskinan pada Maret 2020 menjadi 12,28 setelah pada September 2019 ada di angka 11,44. Laju ekonomi pada semester 1



### 3 Klaster

Sebagai penutup, ada satu sisi simetris data yang dapat diungkap yaitu terdapat kemiripan kondisi angka kemiskinan, ketimpangan dan IPM. Secara umum DIY terbagi dalam 3 klaster yaitu Sleman-Kota dengan angka kemiskinan terendah dan IPM tertinggi, Gunungkidul-Kulonprogo di angka kemiskinan tertinggi dan IPM terendah, dengan Bantul berada di tengah.

Tentunya dapat menjadi salah satu petunjuk pembangunan walau masih harus dititiktemukan dengan banyak indikator lain. Dan pada data September 2020, kapasitas fiskal DIY rendah, namun pada ukuran kabupaten/kota, Gunungkidul termasuk kapasitas fiskal tinggi bersama Sleman dan Kota Yogyakarta, di atas Bantul yang sedang dan Kulonprogo yang rendah. Potensi ini dapat menjadi cahaya motivasi untuk meningkatkan pencapaian SDGs atau Pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. □

*\*) Doddy Bagus Jatmiko SE Akt, Kasubbid Kesra Bappeda DIY & Akuntan anggota IAI*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**Pikiran Pembaca**  
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

### Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

**PANDEMI** Covid-19 tak kunjung reda. Jumlah terinfeksi virus Korona terus bertambah dari hari ke hari. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah. Rumah sakit dipenuhi pasien Covid-19. Begitu pula unit perawatan khusus di ruang ICU. Mengingat kondisi tersebut, pembelajaran tatap muka yang sebelumnya diagendakan mulai awal Januari batal dilaksanakan. Rencananya diundur Februari. Itupun dengan sejumlah catatan. Dimulai dari kampus terlebih dahulu kemudian menyusul SMA.

Di beberapa daerah, memang tidak sama kebijakan pemerintah daerah setempat dalam mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka. Ada yang bakal memulai pembelajaran tatap muka pada awal Maret mendatang, ada pula yang enam bulan ke depan. Bahkan ada yang lebih rinci dalam merencanakannya, termasuk memperhatikan dari mana siswa berasal, apakah dari zona merah atau bukan. Ini semua untuk menghindari agar sekolah tidak menjadi klaster baru. Kenyataan ada sekolah yang sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru tapi kemudian dihentikan.

Memang serba sulit menghadapi kondisi seperti ini. Sebab untuk mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya adalah menjaga jarak satu dengan yang lain. Konsekuensinya siswa harus belajar di rumah secara online atau pembelajaran jarak jauh. Tidak ada yang tahu dan belum ada

studi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Di negara lain pun demikian. Semua menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin tinggi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Belakangan pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa Bali. Sedangkan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menindaklanjuti Instruksi Mendagri dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY mulai berlaku 11 Januari hingga 24 Januari 2021. Di DIY, Instruksi Mendagri dipadukan dengan kearifan lokal DIY. Istilahnya tidak disebut PSBB tapi PTKM.

Kedua instruksi tersebut intinya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Karena itu, sebagai warga masyarakat kita harus menghormati dan melaksanakan instruksi tersebut. Setidaknya kita mengurangi aktivitas di luar rumah jika memang tidak mendesak. Kita juga wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

Bagaimanapun tentunya kita semua berharap pandemi Covid-19 cepat berakhir, sehingga sekolah bisa kembali normal begitu pula sektor lain. Untuk itu tidak ada kata lain kita harus disiplin mematuhi protokol kesehatan. □

*\*) Tomi Riskiawan, Jalan Bantul, Yogyakarta.*

## Hijaukan Bumi, Cegah Banjir - Longsor

**MENAPAKI** awal tahun 2021, kita semua masih menghadapi tantangan cukup berat, masih dalam pandemi Covid-19. Bahkan di sisi lain, Januari ini cukup tinggi curah hujannya, karena memang di negeri ini musim penghujan. Januari identik dengan hujan sehari-hari, sehingga di beberapa daerah kita dengar adanya bencana banjir, longsor dan lainnya.

Mengapa setiap musim hujan seolah begitu mudah pelbagai kawasan menjadi banjir atau longsor?

Yang jelas salah satu penyebab bencana banjir diakibatkan karena adanya lahan atau tanah yang gundul terutama di kawasan pegunungan. Sehingga ketika hujan lebat turun, tidak menutup kemungkinan daerah tersebut tidak lagi dapat menahan air hujan yang tercurah. Daerah yang lebih rendah kemudian mengalami bahaya banjir. Sedang di kawasan lebih tinggi mudah terjadi bencana tanah longsor.

### Lahan Hijau

Sejatinya, dunia internasional telah menetapkan 10 Januari sebagai Hari Menanam Sejuta Pohon. Sementara, Indonesia menandai 10 Januari sebagai Hari Lingkungan Hidup Nasional. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya secara internasional pun dunia — yang kemudian diadopsi Indonesia — dengan pengakuan bahwa adanya lahan hijau yang semakin hari semakin berkurang. Dan hal ini tak bisa diabaikan.

Ajakan menyelamatkan bumi ini tentu positif, termasuk bagi Indonesia. Karena bagaimana masyarakat Indonesia dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional ini juga diajak

### Djati Julitriarsa

agar bisa bersahabat dan memelihara ekosistem serta ekologi bumi. Adalah ironi, peristiwa tanah longsor dan banjir selalu terjadi. Sementara penggundulan hutan terus dilakukan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya berpikir untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, serta mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Bisa dibayangkan, seandainya penduduk Indonesia yang menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020 mencapai 270 juta lebih, seperempatnya saja yang bersedia menanam pohon. Ini yang dapat untuk melestarikan hutan terutama di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Jika terjadi tentu tidak hanya satu juta pohon yang bisa ditanam, namun akan sebanyak sebut saja hampir 70 juta pohon dapat tumbuh dengan baik. Bila berlaku pula bagi masyarakat perkotaan, tak akan ada lagi wabah banjir di kota.

### Mengambil Hikmah

Namun tentu saja kita wajib pula memeliharanya dengan baik, agar lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik pula, demi kehidupan yang lebih sejahtera bagi umat manusia. Bila ini kita lakukan setiap tahunnya, dapat dipastikan negeri ini akan semakin mampu memberikan

harapan yang lebih baik bagi kehidupan manusia.

Upaya ini dapat kita lakukan kalau setiap insan di bumi Indonesia menyadari akan adanya ekosistem yang perlu dijaga kelestariannya, dan pola pikir setiap warga negara adalah fokus pada kepentingan bersama, bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Karena itu, marilah kita mengambil hikmah dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Indonesia ini dan sekaligus sebagai peringatan Hari Menanam Sejuta Pohon.

Tidak sekadar memperingati. Namun mari kita wujudkan secara nyata untuk melakukannya demi kelangsungan hidup bangsa dan bagi anak cucu kita nantinya. □

*\*) Drs Djati Julitriarsa MM, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.*

## Pojok KR

Sriwijaya Air SJ182 diperkirakan jatuh di Kepulauan Seribu

-- Ikut belaskawala atas musibah ini

\*\*\*  
Tambah 301 kasus baru, pengawasan di DIY harus diperketat

-- Kesadaran warga juga harus ditingkatkan

\*\*\*  
Polisi di Grobogan bubarkan pesta pernikahan -- Masih juga ada yang belum paham

*Beraba*

**Kedaulatan Rakyat**  
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriza Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan :** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwardono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkyk@yahoo.com](mailto:iklankrkyk@yahoo.com), [iklankrkyk13@gmail.com](mailto:iklankrkyk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) ... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi Di s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.